


Universitas Andalas
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DAFTAR HADIR KULIAH
Semester : Genap 2018/2019
Kode / Mata Kuliah : ISN 412/Akuntabilitas Publik dan Pengawasan
Nama Kelas : 4(ADP)
Program Studi : Administrasi Publik
Jumlah Peserta : 2
Dosen : Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si

No.	No BP	Nama	Ke	Tanggal															
				20/1	31/1	7/2	14/2	21/2	28/2	28/2	28/2	28/2	28/2	28/2	28/2	28/2	28/2	28/2	
MAHASISWA																			
1	1710841003	FILLIA AGUSTIN COIRAL	0																
2	1710841017	MUHAMMAD HAFIDZ	0																

att : Bagi mhs tidak terdaftar, tidak dibenarkan menambah dengan menulis tangan.

Padang, 24 Januari 2019

Wewen Kusumi Rahayu
 NIP: 1986051420122006


Universitas Andalas
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
REALISASI PERKULIAHAN
Semester : Genap 2018/2019
Kode / Mata Kuliah : ISN 412/Akuntabilitas Publik dan Pengawasan
Nama Kelas : 4(ADP)
Program Studi : Administrasi Publik
Dosen : Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si

Kuliah Ke	Hari/Tanggal	Materi Kuliah	Nama Dosen	Tanda Tangan
1	Kamis / 24-1-2019	Kontrak Kuliah - Sambutan umum AK. Publik.	Wewen kr	Wewen
2	Kamis / 31-1-2019	- Definisi akuntabilitas > publik. > pengawasan	Wewen kr	Wewen
3	Kamis / 7-2-2019	- Konsep ak. publik dan dan AP.	Wewen pr	Wewen
4	Kamis / 14-2-2019	- Metode / Strategi Ak. publik	Wewen pr	Wewen
5	Kamis / 21-2-2019	- Ak. publik internal & eksternal	Wewen pr	Wewen
6	Kamis / 28-2-2019	- Akutifitas pem & ak. publik.	Wewen pr	Wewen
7	Kamis / 28-2-2019	- Jenis 2 ak. publik.	Wewen pr	Wewen
8		UJIAN MID SEMESTER	Wewen kr.	Wewen
9	Kamis / 28-3-2019	Konsep & teori pengawasan	Wewen kr	Wewen
10	Kamis / 4-4-2019	alat pelaksana pengawasan objek pengawasan	Wewen kr	Wewen
11	Kamis / 11-4-2019	Jenis 2 pengawasan & strategi	Wewen kr	Wewen
12	Kamis / 18-4-2019	faktor penentu keberhasilan pengawasan	Wewen kr	Wewen
13	Kamis / 25-4-2019	Umpun balik pengawasan	Wewen kr	Wewen
14	Kamis / 2-5-2019	Partisipasi masyarakat dan pegawai	Wewen kr	Wewen
15	Kamis / 9-5-2019	Pengawasan publik dan AP.	Wewen kr	Wewen
16		UJIAN AKHIR SUT	Wewen kr	Wewen

DAFTAR NILAI MAHASISWA

Nama MataKuliah : Akuntabilitas Publik dan Pengawasan
Kelas : 4(ADP)
Dosen : Wewen Kusumi Rahayu
Semester : Genap 2018/2019

No	No. BP	Nama Mahasiswa	Program Studi	Nilai	Pengubah Nilai	Tanggal Update
1	1710841003	FILLIA AGUSTIN COIRALA	Administrasi Publik	A-	Wewen Kusumi Rahayu	2019-05-28 13:37:36
2	1710841017	MUHAMMAD HAFIDZ	Administrasi Publik	B+	Wewen Kusumi Rahayu	2019-05-28 13:37:36

Dosen : Wewen Kusumi Rahayu



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
SEMESTER GENAP**

AKUNTABILITAS PUBLIK DAN PENGAWASAN

ISN 409 (3 SKS) Semester 4



Pengampu

Wewen Kusumi Rahayu, SAP, M.Si

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas
Padang**

A. LATAR BELAKANG

Mata kuliah Akuntabilitas Publik dan Pengawasan merupakan mata kuliah pilihan yang ditawarkan pada semester empat (4). Mata kuliah ini memberikan gambaran secara umum mengenai fungsi akuntabilitas dan pengawasan dalam proses Administrasi Publik.

Mata kuliah ini ditawarkan sebelum mahasiswa memilih konsentrasi, dengan pertimbangan bahwa setiap konsentrasi harus bisa memahami konsep akuntabilitas dan pengawasan. Konsentrasi Kebijakan Publik harus bisa memahami bahwa setiap aktor dalam tahapan kebijakan publik harus akuntabel dan melakukan pengawasan. Begitu juga dengan konsentrasi Administrasi Pembangunan dan Manajemen Publik. Bahwa proses Administrasi Pembangunan dan fungsi manajemen harus dilakukan secara bertanggung jawab (akuntabilitas) dan diikuti dengan pengawasan yang objektif.

B. PERENCANAAN PEMBELAJARAN

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Akuntabilitas dan Pengawasan Publik mempelajari dan memahami konsep dan teori akuntabilitas dan pengawasan dalam administrasi publik. Dengan mempelajari konsep tersebut, maka akan diketahui hal-hal yang mempengaruhi proses administrasi publik dari segi akuntabilitas. Materi pembelajaran memberikan gambaran mengenai pentingnya akuntabilitas dan pengawasan dalam proses administrasi publik.

2. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki kemampuan;

- a. Memahami interaksi sektor publik, swasta dan masyarakat.
- b. Memahami transparansi dan keterbukaan dalam Administrasi Publik.
- c. Memahami akuntabilitas dan *democratic governance*.
- d. Memahami dimensi dan tipe akuntabilitas dalam sektor publik.

3. Capaian Pembelajaran dan Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

- a. Mengetahui dan menjelaskan definisi, fungsi dan aktor yang melakukan akuntabilitas publik dan pengawasan.
- b. Menjelaskan permasalahan publik terkait dengan akuntabilitas dan pengawasan.
- c. Menjelaskan partisipasi masyarakat dan mewujudkan akuntabilitas publik dan fungsi pengawasan.

4. Bahan Kajian dan Reverensi

- a. Hunt, G. (ed) Whistleblowing in the Social Services: Public Accountability & Professional Practice, Arnold (Hodder), 1998.
- b. Robbin, Stephen P. 2003. *Organitational Behaviour, Then Edition*. New Jersey: Pearson Education, Inc. Alih Bahasa: Molan, Benyamin (2006). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gramedia
- c. Pfeffer, Jeffrey And Selancik, Gerald. 2003. *The Extenal of Organization: A Resource Dependence Perspective*. Stanford, California: Stganford Universit Press
- d. Chen, K.C.W, Chen, Z and Wei K.C.J. 2003. *Disclosure, Corporate Governance and the cost of Equity Capital in Emerging Markets, Working Paper Series*. Social Science Research Network
- e. Kreitner, R and Kinicki A. 2004. *Organizational Bahaviour*. McGraw-Hill Companies, Inc, New York

5. Metode Pembelajaran dan Alokasi Waktu

No	Model Belajar	Yang Dilakukan Mahasiswa	Yang Dilakukan Dosen
1.	<i>Lecturer</i>	<ul style="list-style-type: none">- Mendengarkan uraian materi.- Menemukan contoh permasalahan.	<ul style="list-style-type: none">- Menyampaikan materi sesuai dengan silabus dan RPKPS
2	<i>Small Group Discussion</i>	<ul style="list-style-type: none">- Membentuk kelompok.- Memilih bahan diskusi.- Mempresentasikan paper dan mendiskusikan dikelas.- Menjadi moderator.	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rancangan bahan diskusi dan aturan diskusi.- Mengulas pada setiap akhir session diskusi mahasiswa.

6. Pengalaman Belajar Mahasiswa

Perkuliahan diawali dengan metode ceramah atau *Lecturer*. Dosen pengampu menguraikan dan menjelaskan tema perkuliahan sesuai dengan tema yang telah disusun dan disepakati bersama dalam bnetuk RPKPS. Mahasiswa diharapak

mampu menemukan dan menyampaikan contoh dan permasalahan terkait dengan setiap tema yang dipelajari.

Perkuliahan juga didukung dengan metode diskusi. Mahasiswa dituntut untuk mampu menganalisis permasalahan sesuai dengan tema dalam bentuk *paper* atau makalah kelompok. Setiap makalah akan dipresentasikan, sehingga menjadi proses pembelajaran bagi mahasiswa untuk menyampaikan dan mempertahankan idenya dalam bentuk lisan.

7. Kriteria (Indikator) Penilaian

Kriteria penilaian dalam mata kuliah ini menggunakan prinsip otentik, objektif dan akuntabel yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria menunjukkan pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahap pembelajaran, dengan unsur-unsur yang menunjuk kualitas kinerja mahasiswa.

8. Bobot Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)
1. Penilaian hasil		
a.	UTS	25
b.	UAS	30
c.	Tugas	30
d.	Keaktifan	15
Total		100

9. Norma Akademik

Norma akademik yang diberlakukan dalam perkuliahan dapat berupa :

- Kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran minimal 75% dari total pertemuan kuliah yang terlaksana.
- Kegiatan pembelajaran sesuai jadwal resmi dan jika terjadi perubahan ditetapkan bersama antara dosen dan mahasiswa.
- Toleransi keterlambatan 15 menit.
- Selama proses pembelajaran berlangsung HP dimatikan.
- Pengumpulan tugas ditetapkan sesuai jadwal.
- Mahasiswa yang berhalangan hadir karena sakit (harus ada keterangan sakit/surat pemberitahuan sakit) dan halangan lainnya harus menghubungi dosen sebelum perkuliahan.

- g. Berpakaian sopan dan bersepatu dalam perkuliahan, pakai baju/kameja putih dan celana hitam untuk pria dan rok hitam bagi perempuan pada saat UTS dan UAS.
- h. Kecurangan dalam ujian, nilai mata kuliah yang bersangkutan nol (0).
- i. Norma akademik lainnya.

10. Rancangan Tugas Mahasiswa

Tugas presentasi kelompok bertujuan memberi pengalaman dan latihan kerja tim (*team work*) dan keterampilan menyampaikan gagasan secara sistematis serta keterampilan pembelajaran multimedia kepada mahasiswa. Kelompok menyiapkan bahan presentasi dalam bentuk *powerpoint*, yang setelah dipresentasikan dan memperoleh masukan pada saat diskusi, lalu kelompok menyempurnakannya dalam *output paper*/makalah (10-15 halaman, format 1,5 spasi), diserahkan kepada dosen satu minggu setelah tampil presentasi.

Kelompok yang bertugas mempresentasikan bahan dan materinya, lalu memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanggapi, bertanya, mengulas serta ikut menambahkan jawaban dan pendapat yang berkembang selama diskusi.

Paper/makalah tersebut berisikan pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan serta daftar referensi. Bagian pembahasan dapat ditambah dan dielaborasi kepada sub-subjudul yang lebih rinci lagi. Paper/makalah tersebut ditulis dengan spasi 1,5 dengan font 12 pt huruf Arial/Time New Roman pada kertas ukuran A4 dan kemudian dijilid dengan sampul berwarna orange. Bentuk dan kualitas paper/makalah akan menentukan nilai yang akan diperoleh kelompok bersangkutan.

Selain itu, juga terdapat tugas individu yang dibuat mandiri dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas individu dikumpulkan satu (1) minggu kemudian. Tidak dibenarkan menitip tugas bagi mahasiswa yang tidak hadir pada saat pengumpulan tugas yang telah disepakati sebelumnya.



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS / PPs : ISIP
UNIVERSITAS ANDALAS

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Akuntabilitas Publik dan Pengawasan	ISN 409	Mata Kuliah Umum	3	4	Desember 2018
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Rumpun MK		Ka Program Studi
	Wewen Kusumi Rahayu, SAP,M .Si			Dr. Ria Ariany, M.Si

Capaian Pembelajaran (CP) Catatan : S : Sikat P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CP Program Studi	
	S 10	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri.
	S 11	Menginternalisasi sikap profesionalitas dan integritas.
	S 8	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
	P 2	Menguasai konsep teoritis secara umum ilmu politik dan teori sosial
	P 3	Menguasai prinsip-prinsip dan kaidah ekonomi makro, hukum administrasi negara, manajemen resiko dan etika administrasi publik.
	P 5	Menguasai prinsip-prinsip dan teknik komunikasi persuasif, baik lisan maupun tulisan.
	KK 1	Mampu menganalisis interaksi antar aktor dalam governansi publik seperti dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pelayanan publik di tingkat lokal maupun nasional, dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan hankam dengan pendekatan ekonomi politik.
	KK 6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
	KK 7	Mampu menganalisis risiko dan melaksanakan program mitigasi resiko terhadap implementasi kebijakan.
	KU 5	Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis, terhadap informasi dan data.

	KU 7	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
	KU 8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
	KU 9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
	CP Mata Kuliah	
	1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori akuntabilitas dan pengawasan (P2, P3, P5).
	2	Mahasiswa mampu merumuskan masalah aktual terkait akuntabilitas dan proses pengawasan dalam proses administrasi publik (KK1, KK5).
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	3	Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dalam melakukan analisis mendalam terhadap kasus akuntabilitas dan pengawasan dalam proses administrasi publik (KU8, KU9).
	Mata kuliah Akuntabilitas dan Pengawasan Publik mempelajari dan memahami konsep dan teori akuntabilitas dan pengawasan dalam administrasi publik. Dengan mempelajari konsep tersebut, maka akan diketahui hal-hal yang mempengaruhi proses administrasi publik dari segi akuntabilitas. Materi pembelajaran memberikan gambaran mengenai pentingnya akuntabilitas dan pengawasan dalam proses administrasi publik.	
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1	Interaksi sektor bisnis, masyarakat dan sektor publik
	2	Good governance dalam administrasi publik
	3	Transparansi dan keterbukaan dalam administrasi publik
	4	Akuntabilitas dan democratic governance
	5	Dimensi dan tipe akuntabilitas dalam sektor publik
	6	Akuntabilitas dan pengawasan publik
	7	Lembaga pengawasan di Indonesia
	8	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Pustaka	Utama :	
	Hunt, G. (ed) Whistleblowing in the Social Services: Public Accountability & Professional Practice, Arnold (Hodder), 1998.	

	Robbin, Stephen P. 2003. <i>Organitational Behaviour, Then Edition</i> . New Jersey: Pearson Education, Inc. Alih Bahasa: Molan, Benyamin (2006). <i>Perilaku Organisasi</i> . Jakarta: Gramedia
	Pendukung : <ul style="list-style-type: none"> - Pfeffer, Jeffrey And Selancik, Gerald. 2003. <i>The Extenal of Organization: A Resource Dependence Perspective</i>. Stanford, California: Stganford Universit Press - Chen, K.C.W, Chen, Z and Wei K.C.J. 2003. <i>Disclosure, Corporate Governance and the cost of Equity Capital in Emerging Markets, Working Paper Series</i>. Social Science Research Network - Kreitner, R and Kinicki A. 2004. <i>Organizational Bahaviour</i>. McGraw-Hill Companies, Inc, New York

Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
		LCD & Projektor
Team Teaching	Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si	
Assessment		
Mata Kuliah Syarat		

Pelaksanaan Perkuliahan 3 SKS

Mg Ke -	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar) dan Referensi	Metode Pembelajaran dan Alokasi waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrak Perkuliahan - Gambaran Umum Akuntabilitas dan Pengawasan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Definisi - Historis keilmuan 	<i>Lecture, Discussion</i> 3x45''	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber dan		5


Mg Ke -	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar) dan Referensi	Metode Pembelajaran dan Alokasi waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot Penilaian (%)
				reverensi.		
2	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Akuntabilitas - Konsep Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Masyarakat - Swasta 	<i>Lecture&Discussion</i> 3x45''	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber dan reverensi.	Ketepatan data, akurasi sumber informasi dan justifikasi dalam mengaitkannya dengan konsep akuntabiliats dan pengawasan	5
3	- Interaksi antara sektor bisnis, masyarakat dan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Peran sektor bisnis/ swasta - Peran masyarakat - Peran sektor publik - Interaksi swasta, masyarakat, publik 	<i>Lecture, Presentation& Discussion</i> 3x45''	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber dan reverensi.	Kelengkapan data pendukung dan kejelasan sistematika penyajian baik laporan maupun presentasi	5
4	- Konsep good governance dalam administrasi publik	- Prinsip-prinsip	<i>Lecture&Discussion</i> 3x45''	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber dan reverensi.	Ketepatan data, akurasi sumber informasi dan justifikasi dalam mengaitkannya dengan	5

Mg Ke -	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar) dan Referensi	Metode Pembelajaran dan Alokasi waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot Penilaian (%)
					pengembangan institusi	
5	- Transparansi dan keterbukaan dalam administrasi publik	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensi - Fungsi - 	<i>Lecture, Presentation&Discussion</i>	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber dan referensi.	Kelengkapan data pendukung dan kejelasan sistematika penyajian baik laporan maupun presentasi	5
6	- Penyusunan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan organisasi - Struktur organisasi 	<i>Lecture&Discussion</i>	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber dan referensi.	Ketepatan data, akurasi sumber informasi dan justifikasi dalam mengaitkannya dengan pengembangan institusi	5
7	- Akuntabilitas dan democratic governance	<ul style="list-style-type: none"> - Urgensi - Prinsip - Saling keterkaitan 	<i>Lecture, Presentation&Discussion</i>	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber dan referensi.	Kelengkapan data pendukung dan kejelasan sistematika penyajian baik laporan maupun	5

Mg Ke -	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar) dan Referensi	Metode Pembelajaran dan Alokasi waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot Penilaian (%)
					presentasi	
8	Ujian Tengah Semester					15
9-10	Dimensi dan tipe akuntabilitas dalam sektor publik	<ul style="list-style-type: none"> - Pola dan mekanisme akuntabilitas - Akuntabilitas program akuntabilitas proses - Akuntabilitas keuangan - Akuntabilitas outcome - Akuntabilitas hukum - Akuntabilitas keuangan - 	<i>Lecture, Presentation & Discussion</i>	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber dan referensi.	Kelengkapan data pendukung dan kejelasan sistematika penyajian baik laporan maupun presentasi	10
11	- Pengawasan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Aktor - Proses 	<i>Lecture, Presentation & Discussion</i>	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber dan referensi.	Ketepatan data, akurasi sumber informasi dan justifikasi dalam mengaitkannya dengan pengembangan institusi	5
12-13	Lembaga pengawasan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Self evaluation organization - Reformasi sistem pengawsan - Problematika pengawasan 	<i>Lecture, Presentation & Discussion 3x45''</i>	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber dan referensi.	Kelengkapan data pendukung dan kejelasan sistematika penyajian baik laporan	10

Mg Ke -	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar) dan Referensi	Metode Pembelajaran dan Alokasi waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria (Indikator) Penilaian	Bobot Penilaian (%)
					maupun presentasi	
14-15	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kapasitas masyarakat - Keterlibatan masyarakat 	<i>Lecture & Discussion</i> 3x45''	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber dan referensi.	Ketepatan data, akurasi sumber informasi dan justifikasi dalam mengaitkannya dengan pengembangan institusi	10
16-17	Korupsi; konsep-problematika	<ul style="list-style-type: none"> - Sebab, dampak, faktor yg mempengaruhi korupsi - Pengawasan dan pemberantasan korupsi 	<i>Lecture, Presentation & Discussion</i> 3x45''	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber dan referensi.	Kelengkapan data pendukung dan kejelasan sistematika penyajian baik laporan maupun presentasi	10
18	UJIAN AKHIR SEMESTER	-				15

TABEL : RANCANGAN TUGAS MAHASIWA

	PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS / PPs : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS				
RENCANA TUGAS MAHASISWA					
MATA KULIAH	Akuntabilitas Publik dan Pengawasan				
KODE	ISN 409	SKS	3	SEMESTER	4
DOSEN PENGAMPU	Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si				
BENTUK TUGAS					
Resume Materi Kulliah					
JUDUL TUGAS					
Tugas-1: Mencari dan meresume materi ajar kuliah ke 2 sampai ke XIV secara mandiri dan mempresentasikan secara kelompok.					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Mahasiswa mampu meringkas materi kuliah ke II sampai ke XIV dalam bentuk makalah secara mandiri dan mempresentasikannya secara kelompok.					
DISKRIPSI TUGAS					
a. Mahasiswa mencari dan meresume materi kuliah ke II sampai ke XIV dalam bentuk makalah. b. Mahasiswa membuat powerpoint untuk presentasi. c. Mahasiswa melakukan presentasi secara kelompok.					
METODE Pengerjaan Tugas					
1. Memilih referensi buku yang akan diresume. 2. Membuat resume buku. 3. Membuat powerpoint untuk presentasi. 4. Menentukan pembagian kerja (moderator, penyaji, penanggapa, notulen) dalam kelompok untuk melakukan presentasi. 5. Presentasi di depan kelas.					
BENTUK DAN FORMAT LUARAN					
a. Obyek Garapan: Membuat resume dan powerpoint materi kuliah. b. Bentuk Luaran: 1. Ringkasan dan powerpoint materi kuliah 2. Ringkasan ditulis dengan MS Word, 1 spasi, huruf times roman, minimal 5 halaman. 3. Slide Presentasi PowerPoint, minimal 10 slide.					
INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN					
a. Ringkasan hasil kajian materi kulaih (bobot 20%) Ringkasan materi kuliah dengan sistematika dan format yang telah ditetapkan, kelengkapan ringkasan materi kuliah sesuai dengan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang telah ditetapkan dalam RPS, kejelasan dan ketajaman meringkas, konsistensi dan kerapian dalam sajian tulisan. b. Penyusunan Slide Presentasi (bobot 30%) Jelas dan konsisten, Sedehana & inovatif, menampilkan gambar (ilustrasi), tulisan menggunakan font yang mudah dibaca, jika diperlukan didukung dengan gambar dan					

video clip yang relevan.
c. Presentasi (bobot 50%) Bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 menit presentasi + 5 menit diskusi), kejelasan & ketajaman paparan, penguasaan media presentasi.
JADWAL PELAKSANAAN
Akan ditentukan pada saat perkuliahan pertama dimulai
LAIN-LAIN
Bobot penilaian tugas ini adalah 30% dari 100% penilaian mata kuliah ini
DAFTAR RUJUKAN
<ul style="list-style-type: none"> a. Hunt, G. (ed) Whistleblowing in the Social Services: Public Accountability & Professional Practice, Arnold (Hodder), 1998. b. Robbin, Stephen P. 2003. <i>Organitational Behaviour, Then Edition</i>. New Jersey: Pearson Education, Inc. Alih Bahasa: Molan, Benyamin (2006). <i>Perilaku Organisasi</i> . Jakarta: Gramedia c. Pfeffer, Jeffrey And Selancik, Gerald. 2003. <i>The Extenal of Organization: A Resource Dependence Perspective</i>. Stanford, California: Stganford Universit Press d. Chen, K.C.W, Chen, Z and Wei K.C.J. 2003. <i>Disclosure, Corporate Governance and the cost of Equity Capital in Emerging Markets, Working Paper Series</i>. Social Science Research Network e. Kreitner, R and Kinicki A. 2004. <i>Organizational Bahaviour</i>. McGraw-Hill Companies, Inc, New York

BENTUK DAN FORMAT LUARAN
<p>a. Obyek Garapan: Membuat resume dan powerpoint materi kuliah.</p> <p>b. Bentuk Luaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ringkasan dan powerpoint materi kuliah 5. Ringkasan ditulis dengan MS Word, 1 spasi, huruf times roman, minimal 5 halaman. 6. Slide Presentasi PowerPoint, minimal 10 slide.
INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN
<p>d. Ringkasan hasil kajian materi kuliah (bobot 20%) Ringkasan materi kuliah dengan sistematika dan format yang telah ditetapkan, kelengkapan ringkasan materi kuliah sesuai dengan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang telah ditetapkan dalam RPS, kejelasan dan ketajaman meringkas, konsistensi dan kerapian dalam sajian tulisan.</p> <p>b. Penyusunan Slide Presentasi (bobot 30%) Jelas dan konsisten, Sedehana & inovatif, menampilkan gambar (ilustrasi), tulisan menggunakan font yang mudah dibaca, jika diperlukan didukung dengan gambar dan video clip yang relevan.</p> <p>d. Presentasi (bobot 50%) Bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 menit presentasi + 5 menit diskusi), kejelasan & ketajaman paparan, penguasaan media presentasi.</p>

RUANG LINGKUP AKUNTABILITAS PUBLIK

Pengertian Akuntabilitas

- Secara umum akuntabilitas adalah sangat erat kaitannya dengan instansi/lembaga pemerintah, dan kaitannya dengan mempertanggungjawabkan kinerjanya.
- Namun demikian belum ada satu definisi tentang akuntabilitas yang bisa diterima oleh semua pakar/ahli.

LAN RI (1999), **akuntabilitas** adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Tipe Akuntabilitas (Djoko Widodo, 2001) :

1. Akuntabilitas politik
2. Akuntabilitas keuangan
3. Akuntabilitas hukum

Lembaga Administrasi Negara (2000:26-27) membedakan akuntabilitas ke dalam empat macam yaitu :

1. *Traditional* atau *Regularity Accountability*
2. *Managerial accountability*
3. *Program Accountability*
4. *Process Accountability*

***Accountability* (Akuntabilitas Publik)**

- Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas **dua macam**, yaitu:
 - a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan
 - b. Akuntabilitas horizontal (*Horizontal accountability*).

PRINSIP AKUNTABILITAS PUBLIK

Melayani warga, bukan pelanggan

Memenuhi kebutuhan Publik

Nilai kewarganegaraan melebihi kewirausahaan

Berfikir secara strategis

Memahami bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak sederhana

Melayani ketimbang menyetir

Menilai manusia, bukan hanya produktivitas

Output akuntabilitas

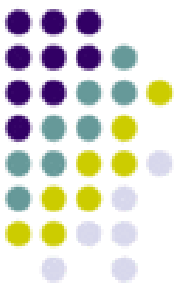
- Output dari akuntabilitas publik adalah pelayanan publik yang memuaskan masyarakat.
- Pelayanan publik yang berkualitas
- Publik sudah membayar pajak kepada pemerintah, **akuntabilitasnya** dilaporkan melalui pemberian layanan publik yang berkualitas

PERGESERAN AKUNTABILITAS PUBLIK

❖ DARI AKUNTABILITAS VERTIKAL MENJADI AKUNTABILITAS HORIZONTAL :

- Berkembangnya Hubungan Akuntabilitas Administratif;
- Peningkatan Adopsi Terhadap Model Akuntabilitas Individu;
- Berkembangnya Badan-badan Independen;
- Meningkatnya Kebutuhan Akan Akuntabilitas Langsung.

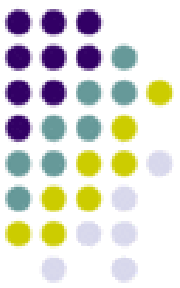
PRINSIP AKUNTABILITAS: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKUR



Indikator Akuntabilitas

1. Proses pembuatan keputusan tertulis memenuhi standar etika dan nilai berlaku, sesuai prinsip administrasi yang benar.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program
3. Kejelasan sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan kelayakannya tersebut
4. Penyebarluasan informasi suatu keputusan melalui media massa
5. Pembukaan akses publik pada informasi keputusan dan mekanisme pengaduan
6. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

PRINSIP AKUNTABILITAS: DEFINISI, INDIKATOR, DAN ALAT UKUR



Alat Ukur Akuntabilitas (example: pemerintah daerah)

1. Pola Dasar, Propeda, Renstra, APBD
2. Sistem dan mekanisme perencanaan, pengendalian pembangunan daerah
3. LAKIP (laporan akuntabilitas dan kinerja pemerinatahan)
4. LKPJ, LPJ-AMJ
5. Kebijakan daerah (SK Gubernur, Perda) dalam pengadaan barang dan jasa, pajak dan retribusi, keuangan daerah, dll
6. Kotak pos pengaduan, berita-berita di media massa, pengaduan LSM, hasil riset, monitoring independen
7. Kriteria untuk mengukur performansi aparat.
8. Perda partisipasi

Mekanisme Akuntabilitas

- Pengembangan Mekanisme akuntabilitas diarahkan untuk:
 - Kejelasan tugas dan peran
 - Hasil akhir yang spesifik
 - Proses yang transparan
 - Ukuran keberhasilan kinerja
 - Konsultasi dan inspeksi publik.



Mekanisme akuntabilitas

- Mekanisme akuntabilitas juga meliputi aspek yaitu **siapa** yang harus melakukan akuntabilitas, **kepada siapa** akuntabilitas ini dilakukan, **untuk apa** akuntabilitas dilakukan, **bagaimana** dan **prosesnya**.
- Mekanisme akuntabilitas ini sangat bervariasi dan sangat ditentukan oleh apakah keputusan atau aktivitas yang dilakukan suatu organisasi mengikat organisasi secara internal atau eksternal

TRANSPARANSI DALAM AKUNTABILITAS PUBLIK

Akuntabilitas



Pengertian Transparansi

- Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan lainnya, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai.
- Transparansi merupakan upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Pengertian Transparansi

- Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat.
- Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakat. Ini akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- Keterbukaan pemerintahan merupakan syarat mutlak bagi suatu pemerintahan yang efisien.
- Keterbukaan mengandung makna bahwa setiap orang mengetahui proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- Dengan mengetahui memungkinkan masyarakat itu memikirkan dan pada akhirnya ikut memutuskan.

Teori tentang TRANSPARANSI informasi

- Pada dasarnya, pemerintah di negara demokrasi telah menyadari bahwa terciptanya keterbukaan (*transparency*) informasi bagi publik dapat berdampak positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum.
- Transparansi akses informasi menjadi salah satu penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah.

Hak atas informasi meliputi :

1. Hak publik untuk memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya (*right to observe*)
 - Hak publik untuk mengakses informasi (*public access to information*)
 - Hak publik untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan (*right to participate*)

4. Kebebasan berekspresi yg salah satunya diwujudkan kebebasan pers (*free & responsible pers*)
5. Hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak di atas diabaikan (*right to appeal*) baik melalui administrasi maupun *adjudikasi* (menggunakan sarana pengadilan semu, arbitrase maupun pengadilan)

Keterbukaan dan Transparansi

(Openness & Transparency)

Indikator Minimal

- ✓ Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik;
- ✓ Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

Perangkat Pendukung Indikator

1. Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;
2. Pusat/ balai informasi;
3. Website (e-government, e-procurement, dsb);
4. Iklan Layanan Masyarakat;
5. Media Cetak;
6. Papan Pengumuman.

TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK

- Sesuai yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Tehnis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan bahwa transparansi pelayanan publik merupakan penyelenggaraan pelayanan publik dimana pelaksanaan tugas dan kegiatan bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tersebut Meliputi :

- Manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya oleh masyarakat. Kegiatan ini harus diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Prosedur pelayanan yang merupakan rangkaian proses atau tata kerja yang menunjukkan adanya tahapan yang jelas dan pasti, sederhana , tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan serta diwujudkan dalam bagan alur.
- Persyaratan teknis dan administratif pelayanan harus diinformasikan secara jelas dan relevan dengan jenis pelayanan serta diletakkan di dekat loket pelayanan.
- Rincian biaya pelayanan harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan dan dapat dibaca serta pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

- Waktu penyelesaian pelayanan dan kurun waktu penyelesaian pelayanan publik harus diinformasikan dan diletakkan di dekat loket pelayanan dengan melaksanakan azas first in first out.
- Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan atau menyelesaikan keluhan/persoalan/sengketa harus ditetapkan dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan.
- Lokasi pelayanan mudah dijangkau dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

FILOSOFI UU KIP



**HAK MEMPEROLEH INFORMASI
MERUPAKAN HAK ASASI MANUSIA
DAN DIJAMIN KONSTITUSI (PASAL 28 F
UUD 1945)**



**MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN
NEGARA YANG TRANSPARAN DAN
TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE)**



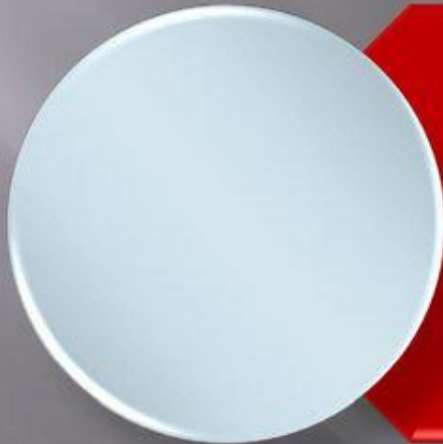
**MENDUKUNG PENYELENGGARAAN
NEGARA YANG DEMOKRATIS
BERDASARKAN TRANSPARANSI,
PARTISIPASI, DAN AKUNTABILITAS**



FILOSOFI UU KIP



**MEMOTIVASI BADAN PUBLIK UNTUK
MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT DENGAN SEBAIK-BAIKNYA
DAN BEBAS DARI KKN**



**MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI YANG SEMAKIN
PESAT, SEHINGGA MENINGKATKAN
MOBILITAS MASYARAKAT
MEMPEROLEH INFORMASI DENGAN
MUDAH DAN CEPAT**

•INFORMASI

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

Jenis-jenis Informasi Publik

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan;

Jenis-jenis Informasi Publik

1. Informasi Secara Berkala:

- a. Berkaitan dg BP
- b. Kegiatan dan Kinerja BP
- c. Min 6 bln 1x
- d. Mudah dijangkau dan dipahami

2. Informasi Secara Serta Merta;

- a. Hajat Hidup Org Banyak
- b. Ketertiban umum
- b. Mudah dijangkau

3. Informasi Tersedia Setiap Saat;

- a. Daftar Informasi Publik
- b. Hasil Kegiatan BP
- c. Kebijakan dan Dok. Pendukung
- d. MOU. SOP
- e. info yg disampaikan pd forum umum

4. Informasi Yang Dikecualikan:

- a. Dilarang berdasar undang-undang